

# ANALISIS KEBIJAKAN HARGA TBS KELAPA SAWIT PADA PIR PERKEBUNAN SEI BESITANG SUMATERA UTARA

Oleh:

Jefferson Situmorang\*)

## Abstrak

Setelah masa konversi, pendapatan petani plasma PIR-BUN Kelapa Sawit sangat tergantung dari harga jual TBS (Tandan Buah Segar). Tingkat produksi dan efisiensi teknis relatif sudah cukup baik, walaupun masih banyak peluang untuk ditingkatkan. Berdasarkan perjanjian, petani plasma seharusnya menjual hasil untuk diolah di inti. Sehingga petani berada pada posisi penerima harga sementara itu inti pemberi harga. Pada awalnya, inti menetapkan harga beli hasil petani, berdasarkan harga jual minyak sawit dan inti sawit oleh PTP dan juga biaya pengolahan serta ongkos transportasi dan administrasi. Pengawal tahun 1987, banyak dibahas terutama kasus-kasus yang ditemukan mengenai penjual hasil plasma ke luar inti. Dibahas juga, bahwa penjual hasil plasma keluar inti. Dibahas juga, penyebab terjadinya penjualan ke luar inti tersebut, adalah sebagai akibat merosotnya harga beli inti dibandingkan swasta, sehingga logis bila petani plasma cenderung menjual hasil ke luar inti. Gejala ini, dikhawatirkan akan membawa dampak yang kurang baik pada kelestarian usaha kebun petani sesuai dengan budidaya dan juga pada pengembalian kredit oleh petani plasma. Sehingga, untuk mengatasi hal ini pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan penetapan harga beli kelapa sawit petani plasma oleh inti. Tulisan ini mencoba menganalisis jalannya kebijaksanaan tersebut. Ternyata kebijaksanaan ini relatif sudah berjalan secara efektif meningkatkan harga jual petani. Tetapi masih terjadi suatu gejolak harga. Hal ini sulit bila kebijaksanaan harga dan jumlah ekspor (makro) dianggap lebih ensensi. Karena turbelensi harga di tingkat petani juga dipengaruhi oleh kebijaksanaan makro ini, tergantung dari kecepatan perambatan harga dan kesimetrisan perubahan.

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Atas dasar pertimbangan perekonomian global, akhir-akhir ini pemerintah menjalankan kebijaksanaan untuk meningkatkan ekspor. Dari berbagai komoditi ekspor pertanian, kelapa sawit merupakan komoditi dengan peluang terbaik. Sedangkan berbagai komoditi lain memperlihatkan gejala kelesuan karena rambatan resesi dunia. Untuk sejumlah komoditi primer harganya di pasar Internasional akan tertekan dalam beberapa tahun mendatang. Peluang kelapa sawit yang memadai ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan dipasaran

baru seperti RRC dan India (Sumitro, 1987).

Disisi lain, pengembangan kebun kelapa sawit di Indonesia juga ditujukan untuk menyebarkan hasil pembangunan melalui pemerataan pendapatan dan pemilikan lahan, serta pengembangan wilayah (TK-PIR, 1985). Pengembangan kebun kelapa sawit di dominasi oleh perluasan usaha rakyat melalui program PIR Perkebunan (Suryana *et al.*, 1987, Situmorang J. 1986). Pengembangan seperti ini akan memperlihatkan wajah ganda (dua) antara pencapaian efisiensi produksi dan pemerataan.

---

\*) Staf Peneliti, Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.

Memang, sisi mana yang menonjol diantara keduanya belum pernah diteliti secara langsung dan belum banyak diketahui. Bila tujuan kedua yang menjadi pusat perhatian, maka tingkat pendapatan petani, menjadi sangat penting. Tingkat pendapatan petani peserta PIR-Bun sangat dipengaruhi oleh pendapatan dari kebun, dalam hal ini kelapa sawit, dan kurang dipengaruhi oleh hasil dari tanaman pangan dan pendapatan lainnya. Hal ini wajar, karena sesuai dengan tujuan, bahwa komoditi utama adalah perkebunan (Simatupang *et al.*, 1986). Sementara itu tingkat pendapatan dari hasil kebun sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dan harga jual TBS ditingkat petani plasma.

Pada jangka pendek, tingkat produksi TBS dan mutu produksi yang digambarkan oleh rendemen minyak dan inti dapat dianggap tetap, karena teknologi dan kondisi edapik yang sudah tetap. Sampai saat ini, rekomendasi teknik budidaya dapat diterapkan dengan memadai. Sehingga yang jadi peubah dalam pendapatan petani adalah tingkat harga jual TBS di tingkat petani plasma.

Akhir-akhir ini, masalah harga jual petani plasma ke inti pada proyek PIR perkebunan menjadi pusat perhatian. Dikhawatirkan banyak petani yang menjual hasilnya ke luar inti, karena harga jual ke inti lebih rendah dari harga jual ke luar inti (swasta). Bersamaan dengan itu muncullah pasar gelap, karena sesuai dengan perjanjian bahwa plasma harus menjual hasilnya ke inti. Untuk mengatasi masalah ini maka pemerintah melakukan kebijaksanaan harga jual petani ke inti.

Maksud dari tulisan ini adalah untuk mempelajari keefektifan dari kebijaksanaan tersebut dikaitkan dengan kondisi lingkungan perekonomian makro kelapa sawit.

### **Kerangka Pemikiran**

Struktur pasar berkaitan dengan pembentukan harga dan efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran dibedakan atas dua kategori yaitu efisiensi operasional (teknologi) dan efisiensi harga atau disebut juga efisiensi ekonomi. Efisiensi operasional berhubungan dengan minimisasi biaya produksi, sedangkan efisiensi harga berhubungan dengan respons konsumen terhadap nilai akhir suatu komoditi (Kohls dan Downey, 1972). Sehubungan dengan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji pembentukan harga TBS kelapa sawit di tingkat petani plasma peserta PIR.

Analisis struktur pasar dapat menggambarkan keefektifan dan tingkat laku pasar suatu komoditas pada tingkat produsen dan konsumen yang pada dasarnya pada masing-masing tingkat mempunyai kekuatan permintaan dan penawaran. Dengan demikian dapat juga dilihat, hubungan antara pasar dalam negeri dan luar negeri atau antara jenis perusahaan di dalam negeri sesuai dengan mekanisme pasar atau pengendalian yang dilakukan.

Kebijaksanaan harga dapat ditujukan untuk melindungi petani ditingkat petani, seperti penetapan harga dasar sehingga diperoleh insentif produksi, tetapi dapat juga untuk melindungi konsumen, seperti melalui penetapan harga tertinggi. Juga kebijaksanaan harga dapat bertujuan untuk stabilitas harga. Kebijaksanaan harga jual TBS petani, ditunjukkan untuk melindungi petani plasma proyek PIR-BUN kelapa sawit.

### **Tujuan dan Kegunaan**

Mencoba mempelajari perkembangan harga kelapa sawit dan kebijaksanaan harga TBS ditingkat petani peserta plasma, PIR Perkebunan kelapa sawit, dan kaitannya dengan kebijaksanaan makro. Dengan demikian, diharapkan dapat berguna untuk memberi masukan praktis pada pengambilan keputusan.

### **Metoda Penelitian**

#### **Data dan Sumberdata**

Kebun yang diamati adalah kebun PIR Berbantuan Sei Besitang, PTP II di Kabupaten Besitang, Provinsi Sumatera Utara. Pengamatan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada Agustus 1986 dan bulan November 1987.

Data primer dikumpulkan ditingkat kebun dimana petani merupakan anggota-anggota dari PIR perkebunan tersebut. Data primer yang dikumpulkan, meliputi data dasar peserta PIR, teknik dan teknologi budidaya yang meliputi penggunaan tenaga kerja pemeliharaan, jumlah pupuk dan pemupukan, serta masukan produksi lainnya, ongkos produksi, tingkat produksi dan pendapatan petani. Sesuai dengan tujuan tulisan ini, pengamatan ditekankan pada perilaku harga jual TBS Kelapa Sawit oleh petani. Oleh karena pengolahan hasil merupakan hal yang terkait dengan perdagangan tataniaga maka pengolahan hasil TBS juga diamati.

Sehubungan dengan adanya keterkaitan harga yang mencerminkan tingkat integrasi dan struktur pasar, maka dikumpulkan juga data sekunder mengenai perkembangan harga ditingkat lokal, pelabuhan, dan ekspor.

Baik data sekunder maupun data primer khususnya data harga yang dikumpulkan adalah data deret waktu.

### Metoda Analisis

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan bantuan tabel dan grafik. Dasar analisis dilakukan dengan mengamati perkembangan harga dan peubah yang dianggap berhubungan, menurut waktu. Dengan demikian perbandingan-perbandingan yang dilakukan tidak berdasarkan parameter-parameter yang diduga tetapi langsung melalui nilai mutlak dari setiap komponen yang diamati. Dengan demikian penarikan kesimpulan hanya dilakukan berdasarkan alur pemikiran logis yang sistematis.

### Keragaan Umum

Lokasi penelitian, yaitu kebun PIR Besitang berada sekitar 90 km ke arah utara ibukota provinsi, Medan. Kebun inti dari kebun plasma Besitang adalah kebun sawit Hulu I berupa kebun inti yang sudah lama. Kebun sawit Hulu sudah melaksanakan penanaman kembali (replanting) dan telah mempunyai pabrik dengan kapasitas 30 ton yang sudah beroperasi lama.

Luas areal kebun plasma Sei Besitang adalah 1250 ha, yang ditanam (TT) pada tahun 1981/1982. Oleh karena adanya gangguan gajah maka luas areal yang menghasilkan (TM) hanyalah seluas 875 ha. Sedangkan sisanya seluas 500 ha direhabilitasi dengan TT 1984/1985. Pada kebun plasma tersebut ditempatkan sebanyak 500 KK petani yang berasal dari sekitar lokasi kebun atau kabupaten yang berdekatan. Berarti setiap KK memperoleh lahan kebun seluas 2,5 ha ditambah 0,75 ha lahan pangan dan 0,25 ha lahan pekarangan dengan rumahnya. Konversi telah dilakukan pada Desember 1987 dengan jumlah investasi (kredit) petani sebesar Rp 7.673.405,- (maksimum) sampai dengan Rp. 6.085.400,- (minimum) per KK, yang diharapkan dapat dikembalikan selama 14 tahun dengan tingkat suku bunga saldo sebesar 10,5 persen per tahun. Dari hasil perhitungan, cash flow petani, maka ditetapkanlah jumlah pengembalian kredit se-

kitar sebesar Rp. 165.000,- per bulan, yang dipotong langsung oleh BRI dari hasil penjualan TBS petani. Sampai saat ini lahan pangan dan pekarangan relatif belum diusahakan. Gambaran umum lokasi penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Situmorang, 1987.

### Sistem Usahatani Kebun

Pengelolaan usaha kebun plasma dilaksanakan secara bersama melalui koordinasi KUD. Sedangkan pengaturan teknis budidaya tanaman di bawah koordinasi inti, yang meniru sistem perkebunan PTP dengan berbagai penyesuaian. Sehingga terdapat juga hubungan kerja antara KUD sebagai bentuk usaha dengan inti melalui staf tanaman. Sebagaimana telah diutarakan diatas bahwa TM seluas 875 ha yang merupakan bagian dari 300 KK, tetapi sesuai dengan prinsip usaha bersama yang diterapkan maka hasil 875 ha tersebut dibagikan pada seluruh peserta (500 KK) sambil menunggu rehabilitasi dari sisa yang 375 ha sampai menghasilkan.

Pemeliharaan tanaman kebun diorganisasikan melalui mandor kebun yang meliputi pekerjaan menyiang, melalang, dengkelan, perawatan parit dan jalan, pemangkasan, pemupukan, pemberantasan hama, dan penyakit serta panen dan diterapkan menurut cara dan norma<sup>1)</sup> di inti sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan teknik dan teknologi budidaya tanaman sudah berjalan baik sesuai dengan yang dilaksanakan oleh PTP umumnya. Sehingga penerapan teknologi budidaya tanaman bukan merupakan penghalang dalam pengembangan, dengan anggapan bahwa faktor sosial petani dan tenaga kerja dapat dikendalikan. Berbagai permasalahan sosial pengembangan PIR-Bun lebih jauh dapat dilihat pada (Sitorus, 1983, Mubyarto, 1984).

Jumlah tenaga kerja efektif yang tersedia dalam tiap rumah tangga 4-5 jiwa atau setara dengan 2,99 HKP per hari setelah dikurangi untuk kegiatan rumah tangga. Kebutuhan tenaga kerja baku untuk budidaya tanaman kelapa sawit berfluktuasi dan cenderung menurun dari umur tanaman 0-6 tahun. Setelah 6 tahun kebutuhan tenaga kerja relatif

<sup>1)</sup> Istilah norma sering dipergunakan di PTP, yaitu ukuran penggunaan tenaga kerja baku yang dibutuhkan untuk suatu jenis pekerjaan. Sehingga alokasi tenaga kerja dan biaya tenaga kerja didasarkan pada ukuran ini yang merupakan hasil pengamatan empiris.

tetap. Pada pengamatan pertama (umur mencapai 5 tahun) dan kedua (umur 6 tahun tanam) curahan tenaga kerja relatif sama. Rata-rata curahan tenaga kerja per KK untuk 2,5 ha sebesar 32,2 HKP per bulan, dimana 4,5 HKP diantaranya untuk tenaga kerja panen. Dengan demikian terdapat sisa tenaga kerja potensial antara 400-460 HKP per tahun. Perincian dan dampak kebijaksanaan dari keragaan tenaga kerja ini, lebih jauh dapat dilihat pada Suryana *et al.* (1987).

Pemupukan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis daun. Dosis pemupukan pada tahun 1987 adalah 0,75 kg Urea, 1 kg Mof.P., 1 kg Kieserite, 1 kg R.P. dan 0,1 kg Boron masing-masing per pohon pada pemupukan I, ditambah dengan hanya 1,5 kg Urea/pohon pada pemupukan kedua.

Tingkat pendapatan petani disajikan pada Tabel 1 berikut. Pendapatan petani sangat dipengaruhi oleh tingkat harga yang diterima oleh petani.

Tabel 1. Pendapatan total petani plasma menurut sumbernya di PIR Perkebunan Sei Besitang Sumatera Utara, Agustus 1987.

Uraian	Pendapatan (Rp)
Penerimaan rata-rata atas upah kerja (buruh)	Rp. 17.297,-
Penerimaan bersih rata-rata dari penjualan hasil	Rp. 193.058,81
Penerimaan dari usaha pangan dan pekarangan	*)

\*) Pada umumnya belum diusahakan.

## Pengolahan Hasil

TBS hasil panen diangkut dengan pikulan ke tempat pengumpulan buah dan selanjutnya dengan truk ke pabrik inti untuk diproses menjadi minyak dan inti sawit. Mutu minyak dan inti sawit yang dihasilkan dari pengolahan TBS yang kandungan FFA nya maksimum 2,5 persen dalam penanganannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk minyak sawit, kenaikan kandungan FFA selama pengolahan dengan kotoran 0,01 persen. Sedangkan untuk inti sawit, kadar air maksimum inti sawit kering 7,0 persen shell and dirt in bagged kernels 2,75 persen inti sawit pecah 10,0 persen dan inti sawit putih 50 persen. Keragaman persentase ini akan mempengaruhi mutu minyak dan inti yang dihasilkan. Sementara mutu tersebut sangat berpengaruh dalam pemasaran (ekspor). Tingkat produksi (8 ton/ha) cukup baik, lebih tinggi dari perkiraan ADB dan PTP dan juga memperlihatkan mutu TBS yang baik. TBS dapat di terima oleh

pabrik pengolahan dengan rendemen minyak dan inti masing-masing 21,78 persen dan 3,62 persen.

Biaya olah minyak dan inti hasil plasma per kg di pabrik inti pada Juni 1986 dan Oktober 1987 dapat dilihat pada Tabel 2.

Biaya olah langsung Juni 1986 sebesar Rp 35,50 per kg menjadi Rp 33,82 per kg pada Oktober 1987 untuk minyak sawit dan inti sawit.

Tabel 2. Biaya olah minyak dan inti sawit oleh inti di PIR Perkebunan Sei Besitang Sumatera Utara, 1986 - 1987.

Komponen biaya	Minyak		Inti	
	1986	1987	1986	1987
	..... (Rp/kg hasil) .....			
a. Biaya olah langsung	35,50 (36,19)	33,82 (35,08)	35,50 (29,83)	33,82 (28,83)
b. Penyusutan	23,50 (23,96)	23,50 (24,37)	23,50 (19,75)	23,50 (20,05)
c. Biaya penjualan	15,60 (15,90)	15,60 (16,18)	-	-
d. Biaya administrasi	23,50 (23,96)	23,50 (24,37)	-	-
e. Pengangkutan	-	-	60,00 (50,42)	60,00 (51,42)
Biaya total	98,10 (100,00)	96,42 (100,00)	119,00 (100,00)	117,32 (100,00)

Keterangan: Angka dalam kurung adalah persentase terhadap biaya total.

## Perdagangan dan Harga TBS

Berdasarkan perjanjian, setiap petani plasma harus menjual hasil ke inti (PTP) yang menangani pembangunan kebun plasma. Pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit selain yang di miliki PTP, juga telah banyak berdiri dan diusahakan oleh swasta. Hal ini diperkirakan sebagai akibat timbulnya peluang ekonomi dikawasan tersebut. Dengan demikian muncul alternatif penjualan TBS petani plasma bila tidak terikat perjanjian kepada PTP inti. Sebagai bentuk usaha ekonomi mungkin wajar bila KUD atas nama petani berusaha menjual hasil pada harga yang lebih tinggi yang dapat diperoleh sebagai penerimaan yang tertinggi.

Perkembangan harga penerimaan petani di tempat penjualan yakni pabrik PTP dan swasta diperagakan pada Tabel 3 berikut. Juga lihat Gambar 1, yang dibuat berdasarkan tabel tersebut.

Sejak panen pertama (Maret 1985 hingga Juli 1986), petani melalui KUD menjual TBS ke PTP, berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh PTP. Sesuai dengan perkembangan harga pasar, maka PTP juga menetapkan harga TBS petani menjadi semakin menurun. Harga TBS pada Maret 1985 Rp 53,49 per kg turun terus setiap bulannya hingga menjadi Rp 15,00 per kg pada Juni 1986. Sementara perkembangan harga oleh PTP itu berlangsung petani memperoleh informasi pasar bahwa harga di swasta jauh lebih tinggi. Sehingga pada bulan Agustus 1986 petani bersikeras untuk menjual hasil ke swasta dimana swasta membeli dengan harga Rp 48 per kg sementara itu pihak PTP hanya menawarkan harga Rp 15 per kg. Pada periode berikutnya petani KUD menjual hasilnya ke swasta. Sementara itu, di lokasi sekitar kebun petani telah berdiri beberapa pabrik pengolahan swasta yang menawarkan pembelian TBS mereka.

Penjualan ke swasta mengalami kenaikan terus hingga mencapai Rp 108,0 per kg sesuai dengan harga pasar, sementara harga di PTP juga meningkat tetapi masih tetap berada dibawah harga swasta, terlihat jelas pada Gambar 1. Oleh karena penjualan ke swasta sudah berlangsung lama, maka hal ini mengundang perbedaan pendugaan, yakni PTP bersikeras membeli hasil petani plasma dengan harga yang ditetapkan tetapi pihak KUD senantiasa berorientasi pada harga tertinggi di swasta. Dengan demikian timbul masalah tawar-menawar diantara PTP, KUD dan swasta yang juga berkepentingan untuk membeli hasil mereka. Atas dasar ini dan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang ada sejak Juni 1987 KUD diwajibkan menjual hasil kembali ke PTP.

Sejak Maret 1985 hingga Pebruari 1987, rumus yang digunakan oleh PTP dalam menetapkan harga beli TBS petani adalah sebagai berikut:

$$H_{TBS} = 0,90 \{(R_M - BP_M) + R_I (H_I - BP_I)\}$$

dimana:

- $H_{TBS}$  = Harga beli PTP/jual KUD
- $R_M$  = Rendemen minyak
- $H_M$  = Harga jual minyak
- $BP_M$  = Biaya pengolahan minyak
- $R_I$  = Rendemen inti
- $H_I$  = Harga jual inti
- $BP_I$  = Biaya pengolahan inti

Harga jual minyak dan inti sawit oleh PTP untuk setiap bulan ditetapkan dari harga rata-rata penjualan bulan lalu. Sedangkan nilai 0,90 pada rumus adalah koefisien penyesuaian yang ditetapkan PTP.

Tabel 3. Perkembangan harga kelapa sawit di tempat penjualan petani plasma di kebun PIR Sei Besitang Sumatera Utara, 1985 - 1987.

Bulan dan tahun	Jumlah produksi (ton/TBS)	Harga (kg/TBS)	
		Inti	Swasta
1985			
Maret	289	53.49	-
April	408	52.75	-
Mei	417	52.15	-
Juni	524	51.15	-
Juli	560	48.12	-
Agustus	616	48.79	-
September	682	41.25	-
Oktober	542	39.49	-
November	509	31.86	-
Desember	622	34.61	-
1986			
Januari	328	32.38	-
Februari	638	36.04	-
Maret	1258	29.42	-
April	728	18.11	-
Mei	1340	15.02	-
Juni	1050	19.17	-
Juli	1253	17.41	-
Agustus	1414	15.48	41.00
September	1707	-	41.00
Oktober	1438	-	43.50
November	935	-	46.25
Desember	1172	-	68.00
1987			
Januari	514	-	73.00
Februari	765	-	88.00
Maret	888	-	89.00
April	1193	-	108.00
Mei	1510	-	89.50
Juni	1468	75.97	-
Juli	1940	76.30	-
Agustus	1873	77.91	-
September	2915	74.09	78.00
Oktober	1887	70.63	82.50
November	78	69.59	-

Contoh perhitungan untuk mendapatkan harga beli TBS oleh PTP atau harga jual oleh KUD, pada bulan Agustus 1986 adalah sebagai berikut:

Harga jual minyak PTP pada bulan yang lalu (HM) = Rp 202,53 per kg.

Biaya olah minyak (BPM) = Rp 98,10 per kg.

Rendemen minyak (RM) = 14,70 persen.

Harga jual inti PTP pada bulan yang lalu (HI) = Rp 123,88 per kg.

Biaya olah inti (BPI) = Rp 119 per kg.

Rendemen inti (RI) = 2,79 persen.

Bila dimasukkan pada rumus, maka harga beli PTP pada bulan Agustus 1986 adalah:

$$H_{TBS} = 0,9 \ 14,70\% (Rp \ 202,53 - 98) + 2,79\% (Rp \ 123,85 - 119)$$

$$\begin{aligned}
 &= 0,9 (14,70\% \times \text{Rp } 104,43) + 2,79\% \\
 &\quad (\text{Rp } 4,88) \\
 &= 0,9 (15,35 + 0,13) \\
 &= 0,9 \times \text{Rp } 15,48
 \end{aligned}$$

$$H_{TBS} = \text{Rp } 13.932$$

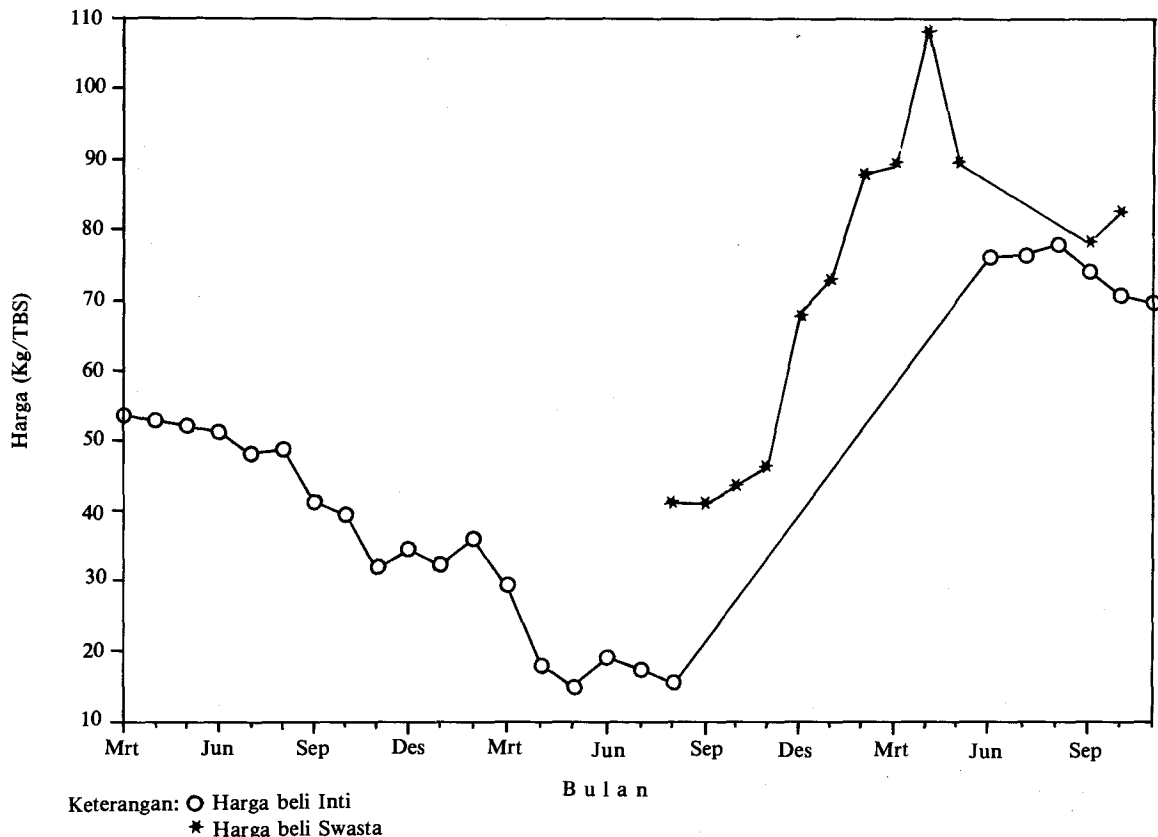
Oleh karena harga ini terlalu rendah maka ditetapkan bahwa harga beli TBS oleh PTP adalah Rp 15,48 per kg, sebelum dikalikan koefisien penyesuaian. Adakalanya koefisien penyesuaian ini tidak digunakan pada harga yang sangat rendah seperti bulan ini. Nilai Rp 104,4 pada perhitungan diatas adalah sisa minyak yaitu sebesar 51,54 persen dari harga jual PTP atau besar biaya pengolahan yang dikenakan untuk hasil TBS petani adalah sebesar 48,45 persen dari harga penjual tersebut. Sedangkan untuk inti sawit biaya olah mencapai 96,08 persen dari harga penjualan inti sawit oleh KUD. Persentase yang tinggi seperti ini dapat terjadi bila harga jual PTP cenderung semakin rendah dan biaya pengolahan PTP semakin tinggi.

Pada bulan Juni 1986 harga ekspor (fob) sebesar Rp 227 per kg minyak dan harga pemasaran domestik sebesar Rp 425 per kg (diolah dari Statistik

Kelapa Sawit, 1986). Dengan demikian bahwa harga jual minyak yang digunakan (HM), bukanlah harga rata-rata dari harga pemasar ekspor dan harga pemasaran domestik, karena harga tersebut masih lebih rendah dari harga ekspor dengan margin sebesar Rp 24,47. Margin tersebut kemungkinan merupakan ongkos angkutan ke pelabuhan dan tarif lainnya.

Bila diasumsikan bahwa biaya pengolahan dan harga jual PTP yang digunakan adalah riil, maka rumus penentuan harga TBS diatas merupakan harga yang paling adil buat KUD, dan pihak PTP, karena sebelum dimasukkan nilai koefisien penyesuaian tersebut, dapat dibuktikan bahwa PTP tidak mendapatkan keuntungan murni. Pembuktiannya dapat dilakukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &KUD \\
 H_{TBS} &= RM (HM - BM) + RI (HI - BI) \\
 &= (RM * HM - RM * BM) + (RI * HI - RI * BI) \\
 &= HK_{TBS}^M - B_{TBS}^M + HK_{TBS}^I - B_{TBS}^I \\
 &= H_{TBS}^M + HK_{TBS}^I
 \end{aligned}$$



Gambar 1. Perkembangan harga jual TBS.

$$\frac{KUD}{H_{TBS}} = \frac{PTP}{H_{TBS}}$$

Dimana:

$$\frac{KUD}{H_{TBS}} = \text{Harga jual TBS oleh KUD.}$$

$$\frac{M}{HK_{TBS}} = \text{Harga (kotor) dari minyak yang dikandung oleh TBS, sebelum diolah.}$$

$$\frac{I}{HK_{TBS}} = \text{Harga (kotor) dari inti sawit yang dikandung oleh TBS, sebelum diolah.}$$

$$\frac{M}{B_{TBS}} = \text{Biaya untuk mengolah minyak yang dikandung oleh TBS, menjadi minyak (CPO).}$$

$$\frac{I}{B_{TBS}} = \text{Biaya untuk mengolah inti sawit yang terkandung oleh TBS, menjadi inti sawit hasil olah.}$$

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa rumus yang digunakan, cukup adil buat KUD maupun PTP karena PTP tidak memperoleh keuntungan murni dari perdagangan hasil pembelian TBS petani.

Berdasarkan rumus diatas, dengan menganggap rendemen minyak dan inti sudah tertentu, maka harga beli TBS oleh PTP dipengaruhi oleh biaya pengolahan dan harga jual minyak dan inti oleh PTP. Dengan demikian kemungkinan penyebab rendahnya harga beli TBS oleh PTP tersebut dibandingkan dengan swasta dapat diakibatkan oleh dua hal yaitu: Pertama, efisiensi pengolahan pabrik PTP yang lebih rendah dibandingkan swasta, sehingga mengakibatkan biaya pengolahan PTP yang lebih tinggi dari swasta. Besar biaya pengolahan PTP adalah Rp 98,10 per kg minyak dan Rp 119 per kg inti, lebih terinci lihat keterangan terdahulu. Keterangan seperti ini juga mempunyai arti bahwa untuk melihat sistem produksi kelapa sawit khususnya oleh Perkebunan Negara perlu dibedakan antara sistem usahatani dengan sub sistem pengolahan pabrik (agro industri). Selama ini pemilahan seperti ini belum biasa dilakukan, dan data yang tersedia senantiasa menyatukan kedua sub sistem itu ke dalam sistem produksi.

Penyebab kedua adalah akibat kebijaksanaan makro. Terutama bila dianggap bahwa faktor pengolahan antara PTP dan swasta sama. Rendahnya harga pembelian PTP dibandingkan pihak swasta

karena harga beli PTP tersebut didasarkan pada perkembangan harga jual minyak dan inti antara ekspor dan penggunaan dalam negeri. Sementara proporsi besarnya ekspor dan penggunaan dalam negeri yang menentukan harga jual PTP dan harga beli PTP tersebut, ditujukan untuk kebijaksanaan ekonomi makro. Kenyataan seperti ini mengakibatkan harga beli PTP menjadi lebih rendah daripada harga beli swasta yang menjalankan mekanisme pasar bersaing.

Dalam rangka penyesuaian agar perbedaan harga tersebut tidak terlalu besar, berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian tanggal 2 Februari 1987, maka ditetapkan rumus pembelian TBS kepada petani peserta PIR sebagai berikut:

$$B_{TBS} = K (H_{cpo} * R_{cpo} + H_{is} * R_{is})$$

Dimana:

K = Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan bagian yang diterima oleh petani peserta.

$H_{cpo}$  = Harga rata-rata tertimbang penjualan minyak sawit selama 1 bulan sebelumnya (ekspor dan lokal).

$R_{cpo}$  = Rendemen minyak sawit.

$H_{is}$  = Harga rata-rata tertimbang penjualan inti sawit selama 1 bulan sebelumnya.

$R_{is}$  = Rendemen inti sawit.

Dengan rumus ini pengaruh biaya pengolahan telah dihilangkan, sehingga biaya tidak langsung sebagai akibat selisih tingkat efisiensi yang dinyatakan oleh biaya pengolahan PTP dan swasta tidak mempengaruhi harga beli PTP kepada petani. Bahkan biaya pengolahan langsung juga tidak dikenakan sebagai tanggungan petani, dan ini dapat dianggap sebagai subsidi PTP kepada petani.

Berdasarkan Tabel 3 diatas, setelah 3 bulan berlangsung yaitu: Juni, Juli, Agustus 1987 penjualan ke PTP, maka pada bulan September 1987 KUD kembali menjual sebagian hasilnya ke swasta dan sebagian kecil ke PTP. Hal ini juga diakibatkan oleh adanya selisih harga yang terjadi, walaupun biaya pengolahan tidak dibebankan kepada petani.

Bila ditinjau kembali keadaan harga TBS pada bulan Agustus 1986 (contoh diatas), menurut ketentuan baru tersebut; maka diperoleh harga beli PTP sebesar:

$$\begin{aligned}
 BTBS &= K (H_{cpo} * R_{cpo} + H_{is} * R_{is}) \\
 &= 0,8 \left( \frac{227 + 425}{2} * 14,70\% + 123,88 * \right. \\
 &\quad \left. 2,79\% \right) \\
 &= 0,8 (47,922 + 3,456) \\
 BTBS &= 41,424
 \end{aligned}$$

Karena inti sawit tidak di ekspor, maka harga inti sawit yang digunakan ( $H_{is}$ ) adalah harga lokal, Rp 123,88 per kg.

Harga beli seperti itu menjadi relatif lebih besar dibandingkan harga beli oleh swasta, yaitu Rp 41,00 per kg TBS. Tetapi pada bulan yang berlaku dengan rumus ini, harga ditingkat petani masih relatif lebih rendah dari di swasta, walaupun tidak berbeda terlalu besar seperti sebelumnya. Gejala harga seperti ini merupakan hal yang sulit dihindarkan karena faktor eksternal lain, seperti kecepatan perambatan perubahan harga ditingkat makro dan kesimetrisan.

Untuk mengatasi gejala tersebut didasarkan dapat menempuh alternatif sebagai berikut. Pertama, biarkan petani PIR bebas menjual hasilnya sesuai dengan harga pasar yang berlaku; tetapi dengan melakukan pengawasan yang ketat agar pengembalian kredit dapat terjamin. Cara ini juga menuntut adanya penyesuaian kelembagaan, serta cara pengaturan kebijaksanaan minyak makro/nasional oleh pemerintah. Kedua, dengan jalan PTP membeli TBS sesuai dengan harga yang berlaku, selanjutnya pihak PTP sebagai bentuk usaha yang maju melakukan kebijaksanaan bersama-sama dengan pemerintah, untuk tujuan makro.

### Ekspor dan Kebijakan Harga Domestik

Terjadinya krisis kopra pada awal tahun 1970 an, merupakan latar belakang dijalankannya kebijaksanaan harga dalam negeri dan jumlah ekspor kelapa sawit pada tahun 1973. Tujuan dari kebijaksanaan tersebut adalah:

- (1) Untuk menstabilkan harga minyak goreng pada tingkat konsumen.
- (2) Untuk meningkatkan jumlah ekspor hasil minyak nabati.
- (3) Untuk melindungi dan meningkatkan pendapatan petani kopra.
- (4) Untuk menjamin agar pabrik dan perkebunan berada pada keuntungan normal.

Belawan merupakan pelabuhan yang paling banyak mengekspor minyak kelapa sawit. Harga yang

ditetapkan di tingkat pelabuhan (FOB Belawan), didasarkan perubahan harga minyak sawit dunia dan harga minyak goreng dalam negeri. Perkebunan tingkat harga yang ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat harga kelapa sawit yang ditetapkan pemerintah di Belawan (fob), 1973 - 1986.

Periode	Rp/kg
Oktober 1973 - Februari 1978	120
Februari 1978 - Juli 1979	198
September 1979 - Maret 1981	220
April 1981 - Mei 1983	260
Mei 1983 - Januari 1984	295
Januari 1984 - September 1985	425
September 1985 - Januari 1986	400
Januari 1986 - Sekarang	425

Sejalan dengan penentuan harga oleh pemerintah juga ditetapkan jumlah kelapa sawit yang dapat dipasarkan didalam negeri. Jumlah ini cenderung untuk mengurangi jumlah sebelum diadakannya kebijaksanaan, sehingga harga kopra relatif meningkat. Jumlah ini disesuaikan per periode sesuai dengan pencapaian tujuan. Ternyata ada kecenderungan bahwa jatah pemasaran dalam negeri tidak senantiasa dipenuhi oleh produsen. Selisih jumlah minyak sawit antara yang ditentukan dengan yang riil dipasarkan, serta keadaan margin harga dan jumlah impor dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbedaan kuota dan realisasi pemasaran domestik, margin harga, dan volume ekspor minyak kelapa sawit, 1978 - 1986.

Tahun	Perbedaan yang ditetapkan dengan yang sebenarnya (1000 ton) <sup>-1)</sup>	Margin harga (Rp/kg) <sup>2)</sup>	Impor (1000 ton)
1978	-88.3 (-9.9)	228.38	-
1979	174.2 (51.0)	198.88	-
1980	214.0 (41.3)	167.50	-
1981	147.6 (21.6)	80.00	33.3
1982	172.7 (24.5)	14.38	0.1
1983	44.2 (7.1)	462.65	0.1
1984	22.2 (2.7)	186.25	57.4
1985	178.6 (20.9)	15.00	37.2
1986	182.4 (45.6)	-51.20	-

Catatan: 1. Jumlah domestik yang ditetapkan - jumlah yang sebenarnya dipasarkan.

2. Harga CIF - Harga FOB Belawan.



Berdasarkan Tabel 4 dan Tabel 5 dapat kita lihat bahwa sukses dicapai pada awal diterapkannya kebijaksanaan, yang secara efektif mengatasi krisis kopra dan terciptanya penanaman investasi dalam pengolahan kelapa sawit. Juga terlihat bahwa jumlah yang sebenarnya dipasarkan didalam negeri lebih besar dari yang ditentukan hanyalah pada awal diterapkannya kebijaksanaan tersebut.

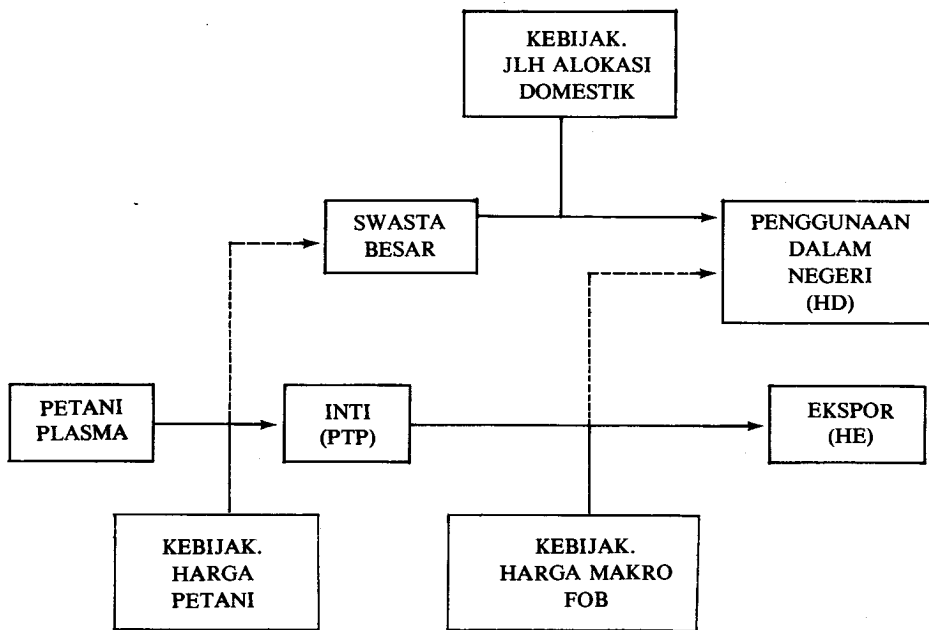
Berdasarkan Tabel 5 di atas terlihat bahwa selisih alokasi PDN yang ditetapkan dengan uang riil berkorelasi dengan margin harga cif dengan fob. Semakin besar margin maka selisih tersebut cenderung semakin tinggi, bahkan dilakukan impor minyak kelapa sawit. Kondisi seperti ini dikawatirkan tidak lagi memenuhi tujuan kebijaksanaan.

PTP sebagai usaha negara lebih mudah dan sesuai untuk digunakan sebagai instrumen kebijaksanaan. Oleh karena itu swasta akan lebih bebas memutuskan dibanding PTP untuk menjual ke luar atau mengisi bahan baku ke dalam negeri. Bila harga minyak sawit dalam negeri lebih tinggi di-

banding ekspor, sesuai dengan latar belakang kebijaksanaan makro maka aliran tataniaga minyak sawit dapat dilukiskan seperti Gambar 2 berikut. Sehingga pengaruh dari kebijaksanaan makro terhadap harga beli swasta dan inti bila dilepas, maka harga beli swasta akan cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu kebijaksanaan harga beli hasil TBS plasma tidak sepenuhnya mengatasi gejolak harga di tingkat petani.

### Kesimpulan dan Saran

1. Diharapkan bahwa masa depan komoditi minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia akan cukup baik, terutama akibat adanya permintaan pasar yang relatif baru. Pengembangan PIR kelapa sawit juga akan cerah, dengan syarat ikutan apabila penggunaan kisi-kisi wajah PIR cukup menunjang. Salah satu kisi yang sangat penting adalah tingkat pendapatan petani plasma. Sesuai dengan tujuan program ini.



**Keterangan:** HD = Harga dalam negeri.

HE = Harga ekspor dimana: HD HE

Garis putus-putus (—) memperlihatkan jalur inferior termasuk pasar gelap.

Gambar 2. Skema rambatan tataniaga kelapa sawit dan kebijaksanaan pemerintah.

2. Tingkat pendapatan petani plasma sangat tergantung dari pendapatan hasil kebun. Dalam jangka pendek, tingkat produksi dan mutu TBS dianggap tetap sesuai dengan peletakan dasar teknik dan teknologi petani. Oleh karena itu satu-satunya faktor yang paling berpengaruh pada pendapatan petani adalah tingkat harga jual petani.
3. Berdasarkan ketentuan yang ada, petani peserta PIR harus menjual hasil ke inti, sehingga petani berada pada posisi penerima harga dan inti sebagai penentu harga. Namun, dari kasus pengamatan pada awal konversi terjadi penjualan hasil keluar inti, yaitu ke swasta. Hal ini terjadi karena harga jual ke inti lebih murah pada ke swasta. Sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pemeliharaan dan pengembalian kredit kebun. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan harga beli oleh PTP.
4. Kebijaksanaan tersebut dapat meningkatkan harga TBS petani, karena pada hasil petani tidak dikenakan biaya pengolahan lagi. Biaya pengolahan sekarang ditanggung oleh inti, jadi seolah-olah hal ini merupakan subsidi inti pada plasmanya, karena seharusnya adalah logis bahwa biaya olah hasil plasma juga ditanggung oleh plasma. Walaupun demikian masih juga ditemukan gejolak harga., yakni ditemukannya margin harga yang relatif rendah antara harga beli swasta dan inti. Hal ini agaknya sulit untuk diatasi apabila kebijaksanaan ekonomi makro perminyakan dianggap lebih penting.
5. Pada ruang lingkup makro pemerintah juga menjalankan kebijaksanaan yaitu kebijaksanaan harga di tingkat pelabuhan (fob) dan penentuan jatah hasil minyak yang dapat dipasarkan di dalam negeri. Kebijaksanaan ini ditujukan untuk melindungi petani kelapa-kopra, karena dikhawatirkan apabila hal ini tidak dilakukan, maka besarnya pemasokan minyak akan dapat menekan harga kopra dalam pembuatan minyak goreng, dan produk minyak nabati lainnya. Tetapi juga ditemukan keanehan bahwa jatah pasar dalam negeri minyak sawit tidak pernah

dipenuhi, kecuali pada awal kebijaksanaan tersebut dilakukan. Artinya, kekhawatiran tadi sebenarnya tidaklah perlu. Agaknya selisih antara jatah pasar dalam negeri dengan yang nyata ditawarkan, berkorelasi dengan margin harga cif dan fob. Bila margin tinggi maka perbedaan penawaran tersebut juga tinggi, bahkan ada kalanya, kita terpaksa mengimpor dari luar.

6. Penyangga harga minyak nabati dan lebih ditekankan pada PTP dengan swasta. Sehingga swasta lebih bebas memilih apakah pasokannya akan dipasarkan di dalam negeri atau diekspor. Hal ini akan berpengaruh pada harga beli swasta dan inti, yang agaknya menimbulkan gejolak harga. Oleh karena itu perlu disarankan untuk melakukan pengkajian yang lebih kuantitatif mengenai hal ini. Sehingga nantinya kebijaksanaan dapat dirumuskan lebih logis dan efektif.

#### **Daftar Pustaka**

- Kohls dan Downey, 1972. *Marketing of Agricultural Products*, 4th Edition.
- Saragih, B. 1987. *Sumbangan Pikiran Pengembangan Pertanian Selama Pelita V*. Institut Pertanian Bogor.
- Simatupang P., J. Situmorang dan Wirawan, 1986. *Pengkajian Produksi dan Pemanfaatan Tenaga Kerja di PIR Perkebunan Kelapa Sawit Besitang Sumatera Utara*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Situmorang J, 1986. *Penelitian Dampak Pembangunan PIR-PTP II Kebun Sei Buatan, Propinsi Riau*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.
- Sumitro D., 1987. *Pidato Pembukaan Ketua Umum IKPN-RI pada Rapat Anggota IKPN-RI. Tanggal 14 Desember 1987*. IKPN-RI, Jakarta.
- Suryana A., J. Situmorang dan Mewa, 1987. *Peningkatan Penerimaan Devisa Non Migas Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Petani dan Nelayan*. Kumpulan Makalah pada Seminar Nasional Perhepi, Cisarua, Bogor.
- Sitorus, E. 1983. *Beberapa Permasalahan yang Dihadapi PN/PTP Dalam Pengolahan PIR/NES*. PT. Perkebunan V Sei Karang, Medan.
- Mubyarto, 1984. *Peranan PIR dalam Pengembangan Petani Perkebunan*, dalam *Kesimpulan Makalah: Seminar Evaluasi Perkembangan dan Prospek PIR Perkebunan PIR-BUN*, 1984. Dies Natalis XIV, LPP. Yogyakarta.